

Clean Government dalam Wajah Birokrasi

Oleh: Susetiawan

Pendahuluan

Pemerintahan bersih, itulah kira-kira padanan kata dalam bahasa Indonesia dari istilah *clean government*.

Mengapa kata tersebut menjadi perbincangan masyarakat baik para pengamat sosial, mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat maupun anggota masyarakat pada umumnya? Jawaban tentangnya sangat sederhana yakni pemerintahan tidak bersih sedang berlangsung di negeri ini. Betapa tidak, pemerintah sedang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat baik internal maupun eksternal. Persoalan internal ditunjukkan dengan merosotnya mata uang rupiah terhadap uang jangkar,¹ sedang secara eksternal ditunjukkan dengan persyaratan IMF terhadap pemerintah Indonesia atas dana bantuan yang diberikannya untuk memulihkan krisis ekonomi. Mengapa terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah kita?

Bukti perbincangan masyarakat dapat juga disimak dalam nuansa umum semua fraksi dalam sidang umum MPR yang telah

usai pada tanggal 11 Maret 1998 yang lalu. Semua fraksi yang ada di MPR menginginkan ditegakkannya pemerintahan bersih dan berwibawa artinya, dalam penyeleng-

¹Hal ini yang mendorong rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditunjukkan dengan beberapa fenomena sebagai berikut: 1. Setelah ditanda tangannya perjanjian dengan IMF tentang kesanggupan lima puluh persyaratan yang diajukannya beberapa orang pejabat dan beberapa orang anggota MPR mencela bahwa bantuan IMF bersifat liberal dan tidak cocok dengan UUD'45. Persoalannya adalah mengapa hal itu dikatakan tidak cocok persyaratan IMF disetujui dan ditanda tangannya? 2. Beberapa hari setelah menjabat sebagai menteri keuangan, menteri keuangan mengumumkan bahwa setiap pembelian valas oleh masyarakat dikenakan PPh. Setelah selsai diumumkan, peraturan menteri tersebut dicabut kembali. Sekurang-kurangnya dua hal di atas menunjukkan bahwa pemerintah kurang memberikan keyakinan atau kepercayaan kepada masyarakat dalam usaha mengatasi krisis ekonomi. Meskipun pada akhirnya pemerintah

garaan pemerintahan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, memiliki keteladanan, jujur, penuh pengabdian dan tanggap terhadap aspirasi dan penderitaan rakyat. Fraksi ABRI menganggap bahwa demokrasi ekonomi yang dikembangkan saat ini, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pemusatan ekonomi dalam berbagai macam monopoli, monopsoni, dan praktek lain yang merugikan masyarakat, belum sepenuhnya terlaksana (Kompas, 4 maret 1998: 1).

Ungkapan pemimpin masyarakat itu sesungguhnya, merupakan akumulasi dari kritik-kritik yang sebelumnya dilakukan oleh para ilmuwan sosial, namun, kritik seperti ini sering dianggap anti terhadap pemerintah dan dianggap tidak mencintai bangsanya sendiri. Hingga saat ini kritik-kritik tentangnya masih berlangsung, bahkan masyarakat menuntut lebih jauh dari itu yakni tuntutan terhadap reformasi politik dan ekonomi. Pertanyaan sekarang adalah mengapa dan bagaimana *unclean goverment* tumbuh subur dalam birokrasi pelayanan di negeri ini? Sampai seberapa jauh dan pada bidang-bidang apa hal itu berlangsung? Apakah *clean government* dapat diwujudkan dalam realitas? tulisan ini hendak mencoba memahami realitas yang ada dan mengagendakan pemikiran yang dapat ditawarkan di masa depan.

Pilihan Rasionalitas Nilai

Dalam kehidupan sosial, baik masyarakat sederhana maupun pola kehidupan yang sangat kompleks, tindakan dan hubungan sosial selalu dituntun oleh sebuah nilai. Persoalan yang membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain terletak pada pilihan nilai-nilai yang dianggap rasional menurut kepentingan mereka. Persoalan rasional dan irasional hanya akan ada jika dilihat dari nilai yang berbeda. Dikotomi desa-kota, tradisional-modern, orde lama-

orde baru bukan hanya dipahami bahwa yang satu adalah lebih rasional dibanding dengan yang lain. Bagaimanapun desa, tradisional, orde lama merupakan tatanan (*order*) yang berdasarkan pada pilihan nilai yang dianggapnya rasional. Orang sering memahami dikotomi semacam ini sebagai bentuk dikotomi rasional dan irasional. Oleh karena itu dalam bahasan berikut ini, saya hendak mencoba memahami bentuk rasionalitas macam apa yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. *

Dalam masyarakat yang telah berkembang industrinya seperti masyarakat organisasi dan birokrasi menjadi penting dalam rangka perkembangan kapitalisme. Birokrasi sebagai mesin organisasi formal menjadi pilihan rasionalitas dalam faham ini. Pada aras ini juga organisasi birokrasi merupakan sebuah alat untuk menegakkan pilihan nilai (*substantive rationality*). Orientasi tindakan dalam organisasi birokratik ini bertujuan memecahkan persoalan dengan cara-cara perhitungan yang sangat tepat dan efisien di bawah aturan-aturan abstrak dan universal. Artinya, organisasi semacam ini memiliki; antara lain aturan yang jelas dan menjamin kepastian, ada pembagian kerja, ada staf yang sesuai dengan keahlian mereka dan staf tersebut dipilih berdasarkan kriteria impersonal dan ada staf yang digaji secara layak menurut keahlian mereka. Tentu, kejujuran, kesetiaan dan kepatuhan bukan lagi ditujukan terhadap pemimpin akan tetapi terhadap nilai yang tercermin dalam peraturan yang berlaku. Pendek kata rasionalitas formal

melaksanakan persetujuan yang telah ditanda tangannya karena desakan-desakan dunia internasional. 3. Kabinet baru dalam PELITA VII paradoks dengan kritik nepotisme yang disuarakan oleh semua fraksi dalam SUMPR.

yang berlangsung dalam organisasi birokratik mengesahkan cara-cara mencapai tujuan dengan perhitungan rasional berdasarkan atas undang-undang, hukum dan peraturan yang ditegakkan untuk kepentingan universal.²

Organisasi birokratik merupakan produk budaya dalam struktur masyarakat egalitarian dengan sistem politik demokratis. Artinya, sistem politik demokratis menjamin hak dan kepentingan semua pihak atas dasar landasan hukum yang berlaku. Keberadaan organisasi semacam ini juga tidak luput dari kontrol masyarakat jika hak-hak dan kepentingan mereka dilanggar. Sebaliknya, masyarakat akan mendapat sanksi hukum jika melanggar kesepakatan nilai dalam sistem hukum yang berlaku.

Organisasi pemerintah dan swasta yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat maupun produksi akan mengikuti irama yang sama yakni dalam lingkup penataan organisasi birokratik sebagaimana uraian di atas. Kritik yang berlangsung di Indonesia terhadap organisasi birokratik baik sektor pemerintah dan swasta selalu didasarkan atas kriteria organisasi birokratik dalam masyarakat industri yang telah berkembang. Persoalannya sekarang bagaimana menjelaskan organisasi birokratik yang tidak efisien, penuh nepotisme, jauh dari kejujuran dan seterusnya? Kriteria organisasi birokratik di atas sulit digunakan untuk menjelaskan fenomena *unclean government* yang berlangsung di Indonesia. Kriteria itu hanya dapat digunakan sebagai kritik dan harapan dari semua pihak untuk mencari alternatif memecahkan persoalan yang ada saat ini.

Penjelasan tentang tidak efektifnya kritik sosial dalam pembangunan di Indonesia pernah saya tulis pada jurnal ini.* Penjelasan saya tentang hal itu berpusat pada bagaimana harmoni atau stabilitas dipahami oleh penguasa. Nilai itu (harmoni) dianggap

sebuah ideologi negara. Harmoni dipahami sebagai bentuk tatanan masyarakat tanpa konflik. Oleh karenanya segala usaha untuk menekankan dan menghapuskan konflik selalu tercermin dalam setiap tindakan penguasa. Persoalannya bukan terletak pada nilai harmoni itu sendiri, akan tetapi bagaimana harmoni itu dipahami dan dikonstruksikan dalam kehidupan sosial.

Paham ini diinstitusionalisasikan dalam masyarakat Indonesia bukan tanpa alasan. *Pertama*, ada alasan nilai nasionalisme yakni melestarikan kebudayaan sendiri sebab harmoni merupakan salah satu nilai inti di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. *Kedua*, ada alasan historis tentang konflik ideologi pada masa pemerintahan presiden Soekarno. Alasan kedua ini dilukiskan oleh Mas'ood (1998: 45) dengan merangkum beberapa pendapat seperti pendapat Mortimer, Crouch dan Lev. Pada jaman pemerintahan presiden Soekarno dinamika kekuatan dimainkan oleh tiga kekuatan besar, yakni presiden Soekarno, PKI dan angkatan Darat (AD). Presiden Soekarno berdiri sebagai penyeimbang.

²Tentang rasionalitas pernah saya tulis dalam disertasi saya *Cultur Values, Organization and Work Performance of Industrial Workers in Indonesia*, Penerbitannya dalam bahasa Indonesia masih dalam proses. Dalam penjelasan di atas saya menghindarkan penggunaan istilah organisasi birokratik modern sebab masyarakat Barat sendiri adalah bentuk masyarakat yang belum selesai. Max Weber telah menjelaskan bahwa rasionalitas formal itu sendiri pada akhirnya menjadi sangkar besi (*iron cage*) bagi kebebasan individu. Sekurang-kurangnya organisasi birokratik seperti itulah yang telah membawa perkembangan kapitalisme industrial.

*Lih. Harmoni, Stabilitas dan Kritik Sosial, UNISIA, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan No. 32/ XVII/IV/1997.

Presiden membutuhkan AD untuk menghambat PKI sedang PKI membutuhkan Soekarno sebagai pelindung untuk melawan AD. AD sendiri membutuhkan presiden Soekarno untuk mendapatkan legitimasinya dan keterlibatannya di bidang politik. Presiden Soekarno sendiri membutuhkan PKI sebagai dukungan massa rakyat untuk mendengarkan pidatonya.³

Konflik ideologi mewakili konflik dalam perang dingin antara paham komunis dan paham kapitalis. Pada akhirnya konflik ideologi ini usai setelah PKI dibubarkan pada tahun 1965. Praktis pada saat itu, setelah tahun 1965, kapitalisme memenangkan pertandingan dan disusunlah pemerintahan baru di bawah presiden Soeharto. Konflik-konflik pada zaman presiden Soekarno itulah yang dipakai alasan oleh pemerintah saat ini bahwa pada masa lalu bangsa Indonesia tidak dapat membangun dirinya.

Pemerintah mulai melakukan reformasi politik dan ekonomi dengan semboyan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Periode pemerintahan sebelumnya dianggap cacat akan hal itu. Selanjutnya pemerintah mulai merampingkan partai politik (tidak hanya sekedar jumlah akan tetapi juga nama dan mekanismenya), mengadakan pemilu untuk membentuk DPR dan MPR, ABRI tidak boleh lagi terlibat politik (akan tetapi mendapat kedudukan kursi di DPR), organisasi buruh dikendalikan oleh pemerintah dan dihapuskan dari keterkaitannya terhadap partai politik. Pendek kata semua bentuk organisasi yang mungkin menimbulkan konflik dengan melibatkan massa besar dikontrol secara ketat untuk menciptakan stabilitas politik demi pembangunan yang mendukung perkembangan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dengan menyertakan modal asing di Indonesia, praktis membutuhkan perombakan struktur politik

dan ekonomi yang mendukung eksistensi modal asing dan membuat kepercayaan dunia internasional bahwa di Indonesia telah terjadi stabilitas politik. Perkembangan berikutnya, apa yang terjadi di Indonesia mirip dengan apa yang disebut oleh O'Donnell dan Schmitter tentang "Otoriterisme Birokratik" (OB) dan "Korporatisme Negara".

Korporatisme Negara merupakan sistem perwakilan kepentingan di dalam mana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi-organisasi yang jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal. Organisasi itu mewajibkan para anggotanya tidak saling bersaing, diatur secara hierarkhis, dibedakan secara fungsional dan diberi izin (mungkin diciptakan) oleh negara serta diberi hak monopoli untuk mewakili bidang masing-masing sebagai imbalan atas kepatuhan dalam pengendalian dan pemilihan pimpinan mereka dan dalam artikulasi tuntutan. Pengaturan organisasi yang bersifat tunggal itu bertujuan meniadakan konflik kelas dan kelompok kepentingan agar tercipta keselarasan, kesetiakawanan dan kerjasama dalam hubungan antara negara dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan birokrasinya, pemerintahan sebuah negara dipegang oleh militer, bukan bermaksud sebagai diktator pribadi, akan tetapi sebagai lembaga yang berkolaborasi dengan teknokrat sipil yang didukung oleh *entrepreneur oligopolistik*

³Situasi konflik pada saat itu AD dan PKI juga mewarnai pengidologian dalam organisasi buruh. Satu pihak buruh diidentikan dengan proletariat yang konsekuensinya berhubungan dengan perjuangan kelas dipihak lain para pekerja diidologikan sebagai karyawan yang konsekuensinya adalah hubungan kerjasama antara majikan dan karyawan. Lih. Jacques Lederc, An Idiological Problem of Indonesian Trade Unionisme in the Sixties: "Karyawan" versus "Buruh", RIMA, Vol. VI, No. 1, 1978.

dan berkolaborasi dengan masyarakat bisnis internasional. Ciri-ciri dalam pengambilan putusan bersifat teknokratik. Pemerintah melakukan tindakan represif untuk mengendalikan oposisi. Oleh karenanya massa didemobilisasikan.⁴ Ciri birokrasi seperti inilah yang disebut dengan otoriterisme Birokratik.

Konsekuensi logis dari pengendalian kelompok-kelompok kepentingan ini adalah bahwa Negara dan aparaturnya, dalam posisi pengambilan keputusan strategis, bagaikan sesuatu yang "suci" seolah-olah tidak pernah salah atau tidak dapat dipersalahkan, anti kritik dan seterusnya.⁵ Hal ini terinstitusionalisasikan dalam kehidupan sosial pada umumnya. Setiap penguasa baik mulai organisasi terkecil sampai organisasi terbesar berdiri sebagai seorang "raja" yang "suci". Budaya masyarakat tentang kesetiaan dan kepatuhan menjadi tidak berubah. Mereka setia dan patuh terhadap sosok orang sebagai penguasa dan bukan terhadap nilai yang ditegakkan untuk menjamin kepentingan publik yang telah dilembagakan dalam sistem hukum. Institusi hukum berjalan dan diatur antara penguasa dan masyarakat dan bukan hukum formal.

Bentuk budaya seperti ini berlangsung pada masyarakat sederhana hingga sistim pemerintahan monarki. Misalnya masyarakat sederhana di sekitar sungai Huang Ho. Mereka percaya bahwa sungai itu ada yang menunggunya. Ia bisa marah jika masyarakat mengabaikan kesetiaan kepadanya, sebaliknya ia akan memberikan kemakmuran jika masyarakat menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan. Mereka percaya jika ada banjir yang mengundang bahaya besar bagi masyarakatnya, itu artinya kemarahan. Oleh karenanya kesetiaan mereka selalu ditunjukkan dengan sesaji agar penunggu (penguasa) sungai Huang Ho tidak marah.

Demikian pula halnya dalam negara Monarki. Sosok kekuasaan sudah lebih

kongkrit yang melekat pada orang dan bukan semata-mata supra natural. Namun, raja bukan sosok manusia biasa. Ia mendapat legitimasi kekuatan supra natural untuk menjaga kekuasaan alam semesta di dunia. Kesetiaan masyarakat dibangun atas legitimasi kekuasaan ini. Raja akan memberikan kemudahan kemakmuran manakala mereka memberikan upeti (bentuk "Sesaji") sebagai rasa hormat dan setia terhadap raja.

Situasi ini belum berubah hingga kini. Oleh karena itu konsekuensi logis dalam masyarakat yang sedang mulai berkembang seperti di negeri ini, ada keinginan besar bagi setiap orang untuk menjadi "raja" kecil. Kolusi dan apapun bentuknya dapat pula diinterpretasikan kembali sebagai bentuk tolong-menolong dalam hubungan kepentingan pribadi. Hal ini dalam rangkaian penjelasan rasional dalam kehidupan sosial. Akibat lebih dalam dari fenomena ini otoriterisme birokratik melestarikan kultur lama untuk membangun kepatuhan dan ke-

⁴Tentang dua hal ini, Otoriterisme Birokratik & Korporatisme Negara, dapat disimak tulisan Mochtar Mas'oe'd *"Ekonomi dan Struktur Politik"*, LP3ES, 1989 hal. 7-18; dalam seminar Partisipasi Buruh dan Hubungan Industrial yang diselenggarakan oleh Fisipol UAJ Yogyakarta & LAPERA Indonesia tanggal 24 Maret 1988, Bambang Kusuma mencoba menjelaskan kemacetan organisasi buruh akibat dari struktur tersebut di atas, *"Nasib Buruh Di bawah Kuasa Negara"*, makalah seminar. Saya mencoba menggabungkan bagaimana paham harmoni sebagai *world view* yang ditransformasikan dalam bentuk struktur negara OB sebagaimana dijelaskan di atas.

⁵Keterasingan Mendagri R. Hartono atas ucapan Frans Seda di Lingkungan Depdagri dan ucapan Nurcholis Madjid tentang reformasi politik ekonomi yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya Depdagri mendapat respon keras, Bernas 26-03, hal. 1.

setiaan, sebaliknya kultur yang telah ada mengkonstruksikan kembali dominasi struktur yang ada. Pertanyaannya sekarang bagaimana konsekuensi birokrasi pelayanan di era industri sekarang ini? Hal ini akan diuraikan dalam penjelasan berikut ini. Menurut hemat penulis, penjelasan di atas merupakan pokok persoalan dari bentuk pemerintahan yang dianggap tidak bersih dan tidak berwibawa apabila hal itu dilihat dari nilai lain yang berorientasi untuk menegakkan nilai di atas kepentingan publik. Pendek kata ada perbedaan pilihan rasionalitas antara rasionalitas menegakkan kepentingan publik (di negara industri Barat), dan rasionalitas untuk kepentingan pribadi seperti di Indonesia.

Etos Pelayanan

Kesetiaan dan kepatuhan, yang pada umumnya, dipahami oleh masyarakat adalah bentuk kesetiaan dan kepatuhan terhadap orang yang dianggap berkuasa. Tentu, paham terhadap nilai ini menjadi etos pelayanan dalam hubungan hierarkhis, baik mereka yang melayani dan yang dilayani. Etos yang dilayani berujud kepatuhan yang ditunjukkan dengan memberikan sesuatu yang berharga terhadap penguasa yang memberikan pelayanan. Sebaliknya etos yang melayani juga menghendaki wujud kongkrit dari rasa kesetiaan mereka yang imbalannya pada yang dilayani adalah kelancaran dalam bidang pekerjaannya. Oleh karena itu etos pelayanan berorientasi kepentingan pribadi, meskipun hal itu merugikan kepentingan masyarakat umum. Bagian ini hendak menunjukkan beberapa fenomena di segala bidang. Tentu, fenomena di bawah ini merupakan pengamatan penulis yang masih perlu dan penting ditelusuri lebih dalam.

Adik saya bercerita tentang bekas teman sekamar sewaktu ia kuliah di Bandung.

Teman seangkatannya itu kini bekerja di salah satu departemen yang berhubungan dengan pemberian keputusan apakah sebuah proyek dapat dibiayai atau dibatalkan atau dijadwal ulang. Sebagai pegawai baru, ia menduduki tempat penting dan strategis dalam pengambilan keputusan. Menurut adik saya, ia anak yang jujur dan sangat sederhana. Ia sering mendapat telepon dari orang-orang yang sekiranya akan menjadi pelaksana proyek yang tujuannya adalah memohon supaya proyek tertentu dapat lolos dan diputuskan untuk dapat dilaksanakan. Ia sering juga menerima uang yang membuatnya terkejut dengan jumlah yang diberikan. Ia bertanya kepada adik saya "dosakah saya menerima uang seperti itu". Ia bercerita bahwa tak pernah meminta. Namun, apa yang ia saksikan dari teman-temannya, tidak segan-segan meminta atau tawar-menawar pada orang yang akan melaksanakan proyek. Tentu hal ini tidak hanya berlangsung dalam satu departemen, bahkan pada umumnya departemen berlaku fenomena yang sama jika berhubungan dengan persoalan pelayanan, apakah pelayanan terhadap pengusaha atau pelayanan terhadap masyarakat yang lain.

Hal yang berhubungan dengan penerimaan pegawai baru pun, yang kini mulai langka di lingkungan pegawai negeri, tidak luput sebagai barang komoditi. Seorang petani tidak sayang menjual tanahnya asal anaknya diterima menjadi pegawai negeri. Apakah hal ini berlangsung sama jika seseorang menjadi ABRI? Jika hal ini berlangsung dalam masyarakat kita, kolusi korupsi akan sulit dihilangkan sebab jika mereka menduduki jabatan tertentu maka ia akan menuntut harga kesetiaan dan kepatuhan bawahan atau orang yang mestinya dilayani, sebagai hal yang sama ketika ia melakukan kesetiaan dan kepatuhan yang pernah ia lakukan. Menurut Mulyana W. Kusuma, di dalam pengadilan pun kolusi

dan korupsi telah membudaya (Bernas, 26-03-1998).

Hal lain yang berhubungan dengan pengawasan terhadap perusahaan juga tidak berbeda dengan fenomena di atas. Sebuah perusahaan banyak mengeluarkan biaya untuk petugas-petugas pemerintah yang berwenang memeriksa. Pengawas ketenagakerjaan misalnya, ia selalu akan mendapatkan uang dari perusahaan agar tidak banyak mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Tentu perolehan ini juga tidak digunakan pribadi, akan tetapi ia harus membagi dengan pimpinannya untuk menunjukkan kesetiaan dan kepatuhannya.

Persoalan polisi lalu-lintas dan pelanggaran lalu-lintas sudah menjadi hal yang sangat biasa, putusan perkara bisa selesai di tempat kejadian tanpa proses pengadilan sebab pelanggaran telah menyediakan "kemudahan". Pendek kata fenomena seperti ini telah meluas, bahkan orang yang berkompoten melakukan pengawasan keuangan pun memiliki tindakan yang sama. Tentu kita tidak dapat mengalihkan perhatian terhadap fenomena seperti ini dengan membersihkan diri bahwa orang yang melakukan tindakan ini adalah "oknum". Usaha mengalihkan perhatian seperti ini hanya akan mengentalkan persoalan dan tidak ada usaha untuk menghapuskan tindakan-tindakan yang amat merugikan publik. Di balik keramahan masyarakat Indonesia tersembunyi watak egois yang tidak peduli dengan kepentingan umum. Sungguh pun paparan di atas didapatkan dari obrolan "warung kopi", jika diteliti dengan benar hal itu akan tampak menjadi masalah serius. Ada motif apa di balik penggelapan uang 1,3 trilyun rupiah yang dilakukan oleh Edy Tansil? Kecerobohan atau kesengajaan? Jelas hingga kini kasus itu belum selesai sebab pelakunya belum diketemukan.

Menatap Masa Depan

Adalah tidak mudah mengambil kesimpulan terhadap penjelasan di atas tentang bagaimana agenda pemikiran perubahan untuk kepentingan bangsa ini di masa mendatang. Penjelasan di atas mengisyaratkan dua hal pokok yang mendasari pandangan dunia (*world view*) tentang berlangsungnya situasi dalam mana *unclean government* tumbuh subur di Indonesia. Pertama, paham harmoni sebagai *world view* yang dengan sekuat tenaga, dengan cara apapun, berusaha menghilangkan semua konflik yang dianggap mengancam kekuasaan dan kedudukan status quo. Oleh karena itu Otoriterisme Birokratik dan Korporatisme Negara merupakan transformasi paham harmoni atau stabilitas tersebut di atas yang dipergunakan sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan, baik nasional maupun internasional dalam rangka perkembangan kapitalisme.

Kedua, paham tentang nilai uang sebagai basis kekuasaan (*Jawa: duit kuwi kuasa*) menjadi *world view* yang dominan. Dengan paham ini kerjasama dengan kapitalisme internasional adalah hal yang utama meskipun tidak harus tunduk seratus persen dari kekuatan kapitalisme internasional. Posisi Otoriterisme Birokratik dan Korporatisme Negara juga merupakan alat untuk mencapai tujuan pencapaian kekayaan. Pada aras ini paham harmoni dan stabilitas bukan merupakan *world view* akan tetapi ia berkedudukan sebagai legitimasi kekuasaan pemerintahan Otoriterisme Birokratik & Korporatisme Negara dengan menggunakan basis kebudayaan nasional yang tidak mungkin menghasilkan harmoni dalam realitas.

Persoalannya sekarang, pandangan mana yang paling dominan antara dua pandangan tersebut di atas? Adalah sulit memberikan jawaban tentang hal itu tanpa studi

mendalam. Singkat kata, jika pandangan pertama yang menjadi dominasi penyelenggaraan negara maka arah perubahan reformatik masih mungkin dilakukan dengan cara merubah paham harmoni dan stabilitas. Paham tersebut tidak dipahami sebagai pikiran untuk menghapus konflik akan tetapi memberi toleransi terhadap konflik.

Konflik diorganisasikan berdasarkan sistim hukum yang menjamin kepastian dalam kehidupan sosial untuk mencapai harmoni dan stabilitas. Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah merubah struktur ke arah mekanisme demokratik dalam pemerintahan untuk membentuk masyarakat yang egalitarian. Tentu hal ini tidak mungkin dicapai dalam waktu singkat sekurang-kurangnya dapat berlangsung satu generasi.

Jika pandangan kedua yang menjadi dominasi, arah perubahan yang bersifat reformatis agak sulit dilakukan sebab kekuasaan dan status quo akan dipertahankan secara turun-temurun untuk menggapai sebanyak-banyaknya pencapaian kekayaan pribadi dan bukan negara. Karenanya ne-

gara bisa *bangkrut* dan individu (elit) menjadi kaya. Pada akhirnya uang adalah sebagai alat kekuasaan itu sendiri. Konsekuensi logis dari pandangan seperti ini *clean government* sulit untuk diciptakan sebab *unclean government* adalah fungsional untuk kepentingan kekuasaan. Dengan demikian pemerintahan tidak bersih semakin melembaga tidak hanya di tingkat pusat melainkan juga sampai pada tingkat lokal. Semua orang berharap bahwa bukan pandangan kedua inilah yang menjadi dominasinya. Jika demikian halnya maka arah perubahan agak sulit dipikirkan jika tidak dengan perubahan secara total dalam satu sistim kebudayaan. Hal ini merupakan agenda kita semua terutama generasi muda untuk memahami secara lebih cermat dan mendalam tentang dominasi pemikiran di atas. Pada akhirnya saya mengajak pembaca untuk merenungkan dan membuat agenda pemikiran tentang perubahan untuk menuju masa depan yang diharapkan dalam rangka menegakkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan publik. ●

